

Perkembangan Sekolah Guru: *Hoogere Kweekschool* Purworejo Tahun 1914-1930

Nazhiifah Nuur'ainii Soniadewi, Dian Satria Charismana

Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik

Universitas Negeri Yogyakarta

Email: nazhiifahnuurainii.2022@student.uny.ac.id, dian_satria@uny.ac.id

Abstract

This study examines the establishment and development of Hoogere Kweekschool in Purworejo between 1914 and 1930, emphasizing its role in shaping the educational landscape in colonial Indonesia. During the early 20th century, education in Indonesia remained inaccessible for the majority, with opportunities restricted to elite circles, primarily to fulfill colonial administrative needs. The founding of HKS marked a significant step in expanding access to advanced teacher training for local youth, aligning with the colonial government's Political Ethical Policy aimed at improving education for indigenous populations. HKS Purworejo, designed to train graduates of kweekschools into highly skilled teachers, offered advanced curricula including pedagogy, Dutch language, mathematics, and general sciences. Using historical research methods, this study explores primary and secondary sources to assess the institution's influence. Findings reveal that HKS Purworejo not only fulfilled colonial labor demands but also contributed significantly to the intellectual and social awakening of Indonesians, laying foundations for the post-independence education system. The study underscores the dual role of colonial education as both an instrument of exploitation and a pathway to empowerment.

Keywords: *Hoogere Kweekschool, Colonial Education, Purworejo*

Pendahuluan

Pendidikan dalam lingkup luas dan lingkup sempit berbeda. Dalam lingkup luas, siswa dapat mengajar dan menyelenggarakan pendidikan kapan saja. Dalam lingkup sempit, siswa terbatas pada jenjang dan lembaga pendidikan, sedangkan pendidikan dalam lingkup luas dapat dilakukan kapan saja.¹ Kehidupan manusia memiliki banyak aspek, termasuk politik, kehidupan bernegara, dan keluarga. Untuk pendewasaan diri, manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan dimulai bahkan sebelum kelahiran dan berlanjut sampai manusia meninggal sepanjang ia mampu menerima pengaruh.

¹ Tatang M. Amirin, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2013), 4.

Pemerintah Hindia Belanda menggunakan pendidikan untuk menghasilkan pekerja yang terdidik dan murah pada masa kolonial. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintahan Kolonial Belanda belum memberikan perhatiannya kepada pendidikan untuk pribumi. Di mana terjadinya Perang Diponegoro dan di negaranya sendiri, Belanda mengalami konflik dengan beberapa negara di Eropa. Akibatnya pemerintah Belanda mengalami kesulitan dalam hal keuangan sehingga pemerintah Belanda menetapkan sistem tanam paksa atau *Cultuurstelsel* di Hindia Belanda. Perhatian pemerintah Belanda yang mulai membangun fasilitas pendidikan di Hindia Belanda bukan bertujuan untuk mencerdaskan dan menciptakan bangsa yang pintar, tetapi justru untuk kepentingan kolonial. Pada saat sistem tanam paksa ini berlangsung, sekolah dasar banyak bertambah dengan tujuan untuk memenuhi tenaga terampil atau tenaga kerja tingkat rendah.²

Penerapan sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda memberikan pengaruh yang sangat kuat, salah satunya adalah meluasnya pengaruh kekuasaan pemerintah Belanda di berbagai aspek kehidupan masyarakat pribumi. Dampak tersebut menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, yang kemudian dipekerjakan di berbagai perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pada tahun 1846, pemerintah Kolonial Belanda mengalokasikan anggaran sebesar 25.000 gulden guna mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi di Pulau Jawa. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk melatih tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kurikulum yang diajarkan mencakup mata pelajaran wajib seperti membaca, menulis, berhitung, dan bahasa, yang semuanya disesuaikan untuk mendukung kebutuhan administrasi kolonial.³

Memasuki akhir abad ke-19, lahirlah kebijakan Politik Etis yang menandai babak baru dalam perpolitikan kolonial di Hindia Belanda. Kebijakan ini berfokus pada tiga gagasan utama, yaitu pengairan, pendidikan, dan perpindahan penduduk. Dengan semangat Politik Etis, pemerintah kolonial memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pribumi, seperti pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan, pengembangan transportasi, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Program-program ini bertujuan tidak hanya untuk mencerdaskan

² Romdhon Aji Saputra, "Perkembangan Sekolah *Hollandsch Inlandsche School* di Purworejo Tahun 1915-1930", *Mozaik: Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol 3 No 6 (2018), 702.

³ Saputra, 702.

rakyat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pemerataan kemakmuran di kalangan penduduk Hindia Belanda.⁴ Dampak nyata dari Politik Etis dapat dirasakan di berbagai wilayah, termasuk Purworejo. Di wilayah ini, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berlandaskan kebijakan tersebut mulai dilakukan, yang secara bertahap memberikan pengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Pada masa pemerintahan kolonial, bahasa Belanda memegang peranan penting sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam pekerjaan di instansi-instansi pemerintahan dan perusahaan di bawah kendali Belanda. Namun, akses terhadap pendidikan pada masa itu hanya terbatas bagi kalangan tertentu. Beragam jenis sekolah didirikan selama era kolonial, seperti *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), *Hollandsch Chinese Kweekschool* (HCK), *Hollandsch Chinese School* (HCS), *Hoogere Kweekschool* (HKS), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), serta sejumlah sekolah lainnya.⁵

Di Purworejo sendiri terdapat *Hoogere Kweekschool*, salah satu lembaga penting yang digunakan selama era kolonial Belanda untuk menghasilkan tenaga pendidik. Sekolah ini dibangun pada tahun 1914, meskipun belum selesai pembangunan. Sekolah ini sudah menerima siswa masuk. Dibangunnya sekolah ini bertujuan untuk memberikan pelatihan guru kepada pemuda pribumi untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah Hindia Belanda. HKS Purworejo didirikan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan kolonial untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat pribumi dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas untuk sistem pendidikan yang semakin berkembang. HKS Purworejo memiliki peran yang penting, tidak hanya dalam menghasilkan guru tetapi juga dalam mengembangkan kapasitas intelektual siswa, yang akan berkontribusi pada kehidupan sosial dan politik Indonesia. Sekolah ini menjadi salah satu pusat pendidikan penting selama masa penjajahan dan menyediakan pendidikan formal dengan standar yang tinggi. Perkembangan HKS sejalan dengan kebutuhan tenaga pendidik yang terus meningkat seiring dengan pendidikan yang lebih luas di seluruh Indonesia. Pemilihan tahun 1914-1930 merupakan tahun aktif HKS beroperasi sebagai sekolah. Di mana pada tahun 1914, HKS mulai menerima masuknya siswa-siswa. Berakhir pada tahun 1930 karena pada tahun tersebut

⁴ Saputra, 702.

⁵ Saputra, 703.

pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan yang berdampak pada pengelolaan sekolah HKS. Sehingga diputuskanlah penutupan HKS Purworejo pada tahun 1930.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode penelitian historis dimulai dari mencari dan mengumpulkan sumber terkait atau yang dikenal dengan heuristik. Setelah itu, sumber sejarah akan melewati tahapan verifikasi berupa kritik intern dan ekstern. Kritik intern umumnya akan menguji keaslian dari isi sumber sejarah sedangkan kritik ekstern lebih pada pengujian keaslian dari sumber tersebut. Keaslian dalam kritik ekstern dapat dinilai berdasarkan jenis kertas maupun tinta yang dipakai dalam sumber sejarah. Jika autentisitas dan keorisinalnya sudah teruji maka akan diinterpretasikan dalam tulisan sejarah atau historiografi.⁶

Sedangkan dalam pencarian sumbernya, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumen. Teknik studi kepustakaan dapat dipahami sebagai cara pengumpulan sumber melalui buku-buku maupun literatur lainnya, seperti koran-koran, majalah lama, catatan laporan serta dokumentasi yang sekiranya masih relevan dengan topik penelitian. Tentunya studi kepustakaan akan lebih banyak menghabiskan waktu mendatangi perpustakaan dibandingkan observasi lapangan.⁷ Di sisi lain, peneliti juga menggunakan teknik dokumen yang dapat diuraikan sebagai pembuktian akan sumber yang didapatkan. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk memverifikasi baik sumber tertulis, lisan, gambar maupun arkeologi.⁸ Pemverifikasian ini biasanya dalam bentuk membandingkan antara beberapa sumber yang ditemukan, baik dari segi isi maupun fisik jika sumber tersebut merupakan sumber primer.

Hasil dan Pembahasan

Keadaan Pendidikan dan Sosial di Purworejo Sebelum didirikannya *Hoogere Kweekschool*

⁶ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 69.

⁷ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1983), 420.

⁸ Nugroho Notosusanto, Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah, (Jakarta: Mega Book Store, 1986), 38.

Purworejo sebagai salah satu bekas kota kolonial yang didirikan pada masa pemerintahan Belanda, hingga saat ini masih menyimpan jejak sejarah yang kuat terkait perkembangan kota tersebut di era kolonial. Keberadaannya sebagai kota yang diatur secara sistematis tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah Belanda, khususnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Desentralisasi.⁹ Kebijakan ini memungkinkan pembangunan pemerintahan lokal di sejumlah daerah, termasuk Purworejo, dengan tujuan utama memperkuat kendali kolonial. Salah satu alasan strategis pembangunan kota ini adalah pendirian tangsi militer, yang berfungsi sebagai basis pertahanan guna mempertahankan kedudukan Belanda sebagai penguasa di Nusantara.

Pada masa kolonial, Purworejo menjadi salah satu kota yang memiliki kekuatan militer signifikan. Hal ini didukung oleh kehadiran pasukan serdadu yang sebagian besar berasal dari Afrika, yang dikenal sebagai Londo Ireng.¹⁰ Keberadaan mereka menunjukkan pentingnya peran militer dalam menjaga stabilitas dan keamanan kolonial di wilayah ini. Selain itu, bukti fisik dari status Purworejo sebagai kota kolonial masih dapat ditemukan hingga kini melalui berbagai bangunan peninggalan era Belanda. Bangunan-bangunan tersebut, yang sebagian besar dirancang untuk keperluan tempat tinggal dan pusat pemerintahan, mencerminkan gaya arsitektur kolonial yang khas. Tata ruang kota Purworejo juga dirancang dengan cermat, menyesuaikan dengan kondisi geografis dan lingkungan sekitar.

Meskipun Purworejo bukan termasuk dalam kategori kota besar, keberadaannya tetap dianggap penting oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota ini dinilai sebagai tempat yang strategis dan aman untuk membangun pemerintahan serta memperkuat kekuatan militer.¹¹ Rencana pembangunan yang terorganisir dengan baik menunjukkan bagaimana pemerintah Belanda berupaya memastikan keberlanjutan kendali mereka atas daerah ini. Jejak-jejak tata kelola dan perencanaan tersebut hingga kini masih menjadi saksi bisu perkembangan kota Purworejo sebagai salah satu pusat aktivitas kolonial yang berperan penting di masa lalu.

⁹ Caesar Bodro Kusumo, "Kota Purworejo Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1900-1942" (Universitas Negeri Semarang, 2015), 7.

¹⁰ Kusumo, 7.

¹¹ Kusumo, 7.

Kondisi sosial di Purworejo sama halnya yang terjadi di daerah lain, perubahan sosial terjadi pada lapisan paling atas yang di duduki oleh kelompok masyarakat Belanda. kedatangan Belanda ke Purworejo mengakibatkan perubahan sosial pada strata sosial, namun masih banyak lahi perubahan-perubahan kondisi sosial yang terjadi. Seperti perubahan pola-pola perilaku masyarakat yang harus menaati peraturan yang diberlakukan oleh Belanda. Politik etis yang diterapkan pada saat pemerintahan Belanda di Purworejo juga mengalami perubahan di mana wilayah Purworejo harus dikembangkan menjadi sebagian dari kebudayaan Barat. Bahasa Belanda di masukkan sebagai pelajaran di beberapa sekolah Kelas Satu, tetapi tidak terlalu intensif pada pembelajarannya. Sejak di jalankannya kebijakan politik etis, pendidikan berkembang lebih pesat. Meskipun diterapkannya politik etis di Purworejo, akan tetapi kesejahteraan rakyat pribumi tak kunjung datang. Pendidikan yang baik tetap terbatas pada golongan atas. Pendidikan di Purworejo pada masa kedatangan Belanda terdiri dari sekolah swasta dan sekolah pemerintah. Pada tahun 1900an, pendidikan di Purworejo menunjukkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi dari pemerintah kolonial. Perkembangan pendidikan di Purworejo kian pesat setelah politik etis diterapkan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, ditandai dengan semakin banyak sekolah yang dibuka di Purworejo, baik yang dibuka oleh pemerintah maupun dari lembaga zending Kristen dan misi Katolik. Sekolah-sekolah itu antara lain *Inlandsche School*, *Chr. Hollandsch Javaansche School*, *Hollandsch Inlandsche School*, *Hollandsch Chinese School*, dan *Lageree Europesche School*.

Perkembangan *Hoogere Kweekschool* Purworejo 1914-1930

Hoogere Kweekschool merupakan salah satu sekolah Kejuruan dari sekolah Pendidikan Guru. Sekolah Pendidikan Guru ini sangat penting karena menyediakan calon guru untuk kelangsungan dan perkembangan sekolah. Dalam sekolah Pendidikan Guru ini terdapat lima macam jenis sekolah dengan fokus yang berbeda-beda. Pertama *Normaalschool* yaitu sekolah guru untuk menjadikan guru SD Kelas II. Kedua, *Normaallengangen voor Inlandashce Hulp Onder wijzers*, merupakan sekolah untuk menjadi Guru Bantu di SD Kelas II. Ketiga, *Leergangen Tot Opleiding van Volksonderwijzers*, sekolah untuk menjadi guru sekolah Desa. Keempat, *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzer* atau yang biasanya dikenal dengan *Kweekschool* merupakan sekolah untuk menjadi guru di HIS

(*Hollandsch Inlandsche School*). Terakhir, *Hoogere Kweekschool* (lanjutan *Kweekschool*) merupakan sekolah untuk melanjutkan pendidikan selama 3 tahun setelah lulus dari *Kweekschool*.¹² Dengan ini, dapat dikatakan bahwa level *Hoogere Kweekschool* lebih tinggi daripada *Kweekschool*.

Pendirian *Hoogere Kweekschool* tidak dapat dipisahkan dari peran penting *Kweekschool* sebagai lembaga pendidikan pertama yang melahirkan guru dari kalangan pribumi. Dorongan utama dalam pendirian HKS adalah meningkatkan kualitas para guru pribumi agar mampu memenuhi tuntutan pendidikan yang semakin berkembang. Meskipun Indonesia telah melatih guru-guru lokal, pemerintah kolonial tetap mendatangkan tenaga pengajar baru dari Belanda. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mengatasi kekurangan guru, tetapi juga untuk memastikan adanya pengajar dengan perspektif segar yang mampu mempertahankan atmosfer pendidikan khas Belanda. Pada tahun 1890, terdapat 453 guru yang mengajar di 144 sekolah, dengan rata-rata 3,2 guru per sekolah untuk 12.377 murid. Dua dekade kemudian, pada tahun 1910 jumlah guru meningkat menjadi 1.056 orang di 194 sekolah, dengan 24.182 murid, atau rata-rata 5,4 guru per sekolah.

HIS menjadi institusi penting bagi masyarakat yang ingin mengakses pendidikan bergaya Barat, khususnya dalam penguasaan bahasa Belanda. Bahasa Belanda tidak hanya menjadi kunci untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tetapi juga membuka akses ke kebudayaan Barat dan memberikan peluang untuk memperoleh pekerjaan. Kemampuan berbahasa Belanda dianggap sebagai simbol prestise yang menempatkan seseorang dalam kelompok intelektual dan kalangan elite. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di HIS yang terus meningkat, guru-guru lulusan HKS (*Hogere Kweekschool*) dari Indonesia mulai dilibatkan.

Sekolah HKS pertama kali didirikan di Purworejo pada Oktober 1914.¹³ HKS menjadi lembaga pendidikan guru tertinggi pada saat itu. Dengan kurikulum yang terus mengalami pembaruan, kebutuhan akan guru yang lebih kompeten dan mampu mengajar secara efektif menjadi semakin mendesak. Namun, lulusan *Kweekschool* dinilai belum sepenuhnya

¹² Moehadi AM et al., *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997), 56.

¹³ Yeni Kurniawati and Ayu Budi Santosa, "RAGAM PENDIDIKAN GURU MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA," *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol 12 No 2 (October 8, 2023), 264, <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.64131>.

memenuhi standar tersebut. Oleh karena itu, pendirian HKS dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut.¹⁴

Gambar 1. Berita tentang pembukaan *Hoogere Kweekschool* di Purworejo.



Sumber: *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 20 Oktober 1914.¹⁵

Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan saat ini, *kweekschool* dapat disamakan dengan jenjang pendidikan setara sekolah menengah pertama (SMP), sementara *Hoogere Kweekschool* berada pada tingkat yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Pada masa tersebut, siswa yang ingin memperoleh sertifikasi resmi sebagai guru, seperti akte guru atau ijazah diploma untuk menjadi kepala sekolah (*hoofdacte*), maupun ijazah diploma untuk menjadi asisten guru (*hulpace*)¹⁶, diharuskan melanjutkan pendidikan mereka ke Belanda. Pendidikan lanjutan di Belanda ini menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kompetensi dan pengakuan formal yang diperlukan agar dapat berkarier sebagai tenaga pendidik profesional dalam sistem pendidikan kolonial.

Hogeere Kweekschool merupakan sekolah guru tingkat lanjut yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Tujuan sekolah ini adalah untuk mendidik para calon guru dari kalangan bangswan bumiputera.

¹⁴ Agus Suwignyo, *Pendidikan, Kekuasaan, Dan Kolonialisme*, (Yogyakarta: Selarung Institute, 2019), 243.

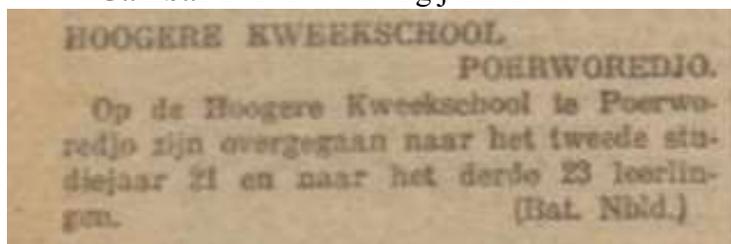
¹⁵ Delpher.nl, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 21 Oktober 1916.

¹⁶ Fajar Rotin Fitriyah, "Telaah Konsep Pemikiran Tan Malaka Dalam Politik Pendidikan Berkarakter Ke-Indonesiaan Perspektif Pendidikan Islam" (S1 Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 62.

Penyeleksian untuk masuk ke HKS sangat ketat, karena banyak dari siswanya berasal dari keluarga terhormat atau seperti sekolah raja. Kurikulum yang diterapkan di HKS Purworejo mengacu pada standar pendidikan Belanda, dengan fokus pada ilmu pengetahuan umum, metodologi pengajaran, dan keterampilan bahasa (termasuk bahasa Belanda). Sejak awal pendiriannya, *Hoogere Kweekschool* di Purworejo menekankan pembelajaran pada mata pelajaran utama seperti bahasa Belanda dan pedagogi, yang dianggap penting untuk membekali siswa dengan kemampuan dasar dalam berkomunikasi serta menguasai metode pengajaran. Seiring waktu, kurikulum di HKS mengalami pengembangan, dengan penambahan sejumlah mata pelajaran lain seperti sejarah umum, aljabar, dan geometri dasar (*vlakke meetkunde*), yang dirancang untuk memperluas wawasan akademik para siswa.

Pada tahun 1917, perubahan signifikan kembali dilakukan dengan memasukkan matematika sebagai bagian dari kurikulum. Selain itu, jumlah jam pelajaran untuk bahasa Belanda juga ditingkatkan, mencerminkan pentingnya penguasaan bahasa ini sebagai syarat kompetensi seorang guru di lingkungan pendidikan kolonial yang sangat mengandalkan bahasa Belanda sebagai medium utama. Lulusan dari HKS Purworejo banyak yang menjadi tenaga pengajar profesional di berbagai sekolah di Hindia Belanda. Mereka tidak hanya mengajar di sekolah-sekolah dasar, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan intelektual di masyarakat. Sebagian lulusan HKS juga melanjutkan karir mereka sebagai pemimpin dalam sektor pendidikan dan pemerintahan kolonial, berkontribusi pada perkembangan pendidikan dan administrasi di wilayah mereka masing-masing.

Gambar 2. Berita tentang jumlah siswa.



Sumber: Het vaderland, 31 Agustus 1916.¹⁷

¹⁷ Delpher.nl, Het vaderland, 31 Agustus 1916.

Pada tahun pertamanya, *Hoogere Kweekschool* Purworejo berhasil meluluskan 19 orang siswa, sebuah pencapaian yang cukup membanggakan pada masa itu. Pada tahun 1916, diberitakan bahwa terdapat 21 siswa yang pindah atau lanjut ke tahun kedua dan ada 23 siswa ke tahun ketiga. Pada tahun 1920, HKS Purworejo juga mencetak lulusan yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yakni Otto Iskandar Dinata. Tidak banyak yang menduga bahwa lulusan HKS ini nantinya akan memainkan peran besar dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Otto Iskandar Dinata memulai karier yang gemilang. Ia pernah menjadi anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada periode 1930–1941, sebuah lembaga yang memberikan ruang bagi wakil pribumi untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam sistem kolonial.¹⁸ Selain itu, Otto Iskandar Dinata juga menunjukkan kiprahnya di dunia pers dengan menjadi pemimpin redaksi surat kabar *Tjahaja* selama periode 1942–1945. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, Otto Iskandar berkontribusi secara signifikan sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Puncak dari pengabdianya adalah ketika ia diangkat sebagai Menteri Negara dalam kabinet pertama Republik Indonesia pada tahun 1945.¹⁹ Sosoknya mencerminkan bagaimana pendidikan di HKS tidak hanya mencetak guru, tetapi juga mempersiapkan individu yang mampu menjadi pemimpin nasional.

Dampak dari Adanya Hoogere Kweekschool Purworejo

Hoogere Kweekschool Purworejo didirikan dengan tujuan utama untuk melatih calon guru dari lulusan terbaik *kweekschool* yang tersebar di berbagai wilayah Hindia Belanda. Lembaga pendidikan ini berfokus pada pembekalan kompetensi tinggi bagi para siswanya, sehingga banyak lulusan HKS yang kemudian menjadi tenaga pendidik di sekolah-sekolah elit, seperti *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) dan *Schakelschool*. Mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan standar pendidikan di kalangan masyarakat pribumi dengan memperkenalkan metode pengajaran yang lebih modern dan mendorong penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa utama dalam proses pembelajaran.

¹⁸ Ex. HKS Bond, *50 Tahun Yang Lalu HKS Dihapuskan*, 1982, 27.

¹⁹ Agung Pranoto, “Sejarah HKS (Hoogere Kweekschool) Purworejo,” 2015, diakses dari <https://budayapurworejo.blogspot.com/2015/>.

Keberadaan *Hoogere Kweekschool* Purworejo tidak hanya berdampak pada sistem pendidikan, tetapi juga memberikan akses lebih luas bagi masyarakat pribumi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan mobilitas sosial dan kapasitas ekonomi para lulusannya. Sebagian besar lulusan HKS berhasil menempati posisi-posisi strategis, baik dalam sistem pemerintahan kolonial maupun institusi pendidikan, sehingga mereka turut andil dalam membangun fondasi pendidikan modern yang memberikan manfaat bagi komunitas pribumi secara keseluruhan.

Pada tahun 1921, sebuah organisasi siswa yang dinamakan *De Broederschap* didirikan oleh para siswa *Hoogere Kweekschool*. Organisasi ini memiliki tujuan utama untuk memperluas akses pendidikan bagi para anggotanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka kursus untuk mendapatkan sertifikat *Hoofdacte* (sertifikat guru kepala) di kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Keberadaan *De Broederschap* mencerminkan bahwa HKS tidak sekadar berfungsi sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga menjadi wadah lahirnya kesadaran kolektif dan inisiatif untuk mendorong kemajuan pendidikan di kalangan siswa.

Setelah HKS Purworejo ditutup pada tahun 1930, bangunan sekolah ini terus memainkan peran penting dalam dunia pendidikan dengan berbagai fungsi yang berganti seiring waktu. Pada masa kolonial, gedung ini digunakan oleh *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), yang merupakan sekolah lanjutan tingkat menengah. Ketika masa pendudukan Jepang, bangunan tersebut diubah fungsinya menjadi sekolah menengah pertama. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, gedung ini menjadi tempat bagi Sekolah Pendidikan Guru (SPG), sebuah institusi yang bertugas mencetak tenaga pendidik, hingga tahun 1991. Setelah SPG ditutup, bangunan tersebut difungsikan sebagai Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Purworejo.²⁰ Pergantian fungsi yang berlangsung dari masa ke masa ini menunjukkan bahwa gedung HKS tetap menjadi pusat kegiatan pendidikan yang berkelanjutan, memperkuat posisinya sebagai simbol komitmen terhadap pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

Gedung kompleks *Hoogere Kweekschool* Purworejo dirancang dengan cermat oleh para ahli yang berada di bawah naungan *Burgerlijke Openbare Werken* (BOW), sebuah lembaga pemerintah kolonial Belanda yang bertugas menangani pembangunan gedung-gedung pemerintah dan

²⁰ Agung Pranoto.

infrastruktur publik. Desain arsitektur kompleks ini menjadi tanggung jawab Hoytema dan Beraud, dua arsitek terkemuka pada masa itu, sementara pengawasan teknis pembangunannya dilakukan oleh Creemaer dan Antonisse. Dalam proses administrasi proyek, posisi penting dipegang oleh seorang mantri pribumi bernama Mas Kartodisaastro yang bertugas mengurus pembukuan.²¹

Beraud sebagai perancang utama menghadirkan konsep desain yang sederhana namun fungsional yang mengedepankan efisiensi dan kenyamanan. Kompleks ini dirancang dengan estetika modern untuk zamannya, menampilkan tata ruang yang tertata rapi dan sistem sirkulasi udara yang optimal di setiap ruangan kelas. Penempatan bangunan di dalam kompleks diperhitungkan secara hati-hati, sehingga tidak ada struktur yang terlalu berhimpitan satu sama lain. Hal ini menciptakan ruang terbuka yang memberikan kesan lega dan mendukung suasana belajar yang nyaman dan produktif.²² Pendekatan ini mencerminkan pemikiran arsitektural yang progresif, menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan pengguna dan fungsionalitas ruang dalam mendukung aktivitas pendidikan.

Simpulan

Pada masa awal pemerintahan kolonial, pendidikan untuk pribumi tidak menjadi prioritas karena pemerintah Belanda lebih fokus pada pengendalian politik dan ekonomi, termasuk penerapan sistem tanam paksa. Sistem ini mendorong berdirinya sekolah dasar yang bertujuan menghasilkan tenaga kerja terampil dengan kurikulum yang sangat terbatas pada kebutuhan administrasi kolonial. Namun, memasuki abad ke-20, kebijakan Politik Etis membawa perubahan signifikan dengan mempromosikan pendidikan, pengairan, dan migrasi sebagai bagian dari tanggung jawab moral Belanda terhadap Hindia Belanda. Kebijakan ini menghasilkan pembangunan infrastruktur pendidikan dan ekonomi yang mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat pribumi.

Di Purworejo, berdirinya HKS pada tahun 1914 menjadi simbol transformasi pendidikan lokal yang terintegrasi dalam kebijakan kolonial. Sekolah ini berperan penting dalam mencetak tenaga pendidik pribumi yang

²¹ Lengkong Sanggar Ginaris, "HKS Purworejo, Tetenger Pendidikan Guru Masa Kolonial Di Purworejo," 2015, diakses dari <https://jejakkolonial.blogspot.com/2015/10/hks-purworejo-tetenger-pendidikan-guru.html>.

²² Ginaris.

dibutuhkan untuk mengembangkan sistem pendidikan Hindia Belanda. Selain itu, HKS juga menjadi pusat pendidikan formal dengan standar yang tinggi, berkontribusi pada perkembangan sosial, intelektual, dan politik masyarakat Indonesia. Namun, keterbatasan akses pendidikan, yang lebih banyak tersedia untuk kalangan elite, mencerminkan ketimpangan sosial yang tetap melekat pada sistem pendidikan kolonial tersebut.

HKS Purworejo tetap aktif hingga tahun 1930, ketika krisis ekonomi global berdampak pada pengelolaan sekolah ini, sehingga menyebabkan penutupannya. Meskipun demikian, warisan yang ditinggalkan oleh HKS, baik dalam hal peningkatan kapasitas intelektual maupun pengaruhnya pada perkembangan pendidikan di Indonesia, tetap signifikan. Perjalanan HKS mencerminkan dinamika pendidikan kolonial yang kompleks, di mana upaya peningkatan pendidikan sering kali dibayangi oleh kepentingan kolonial. Keseluruhan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pendidikan pada masa kolonial membentuk fondasi bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia pada masa-masa berikutnya.

Daftar Sumber

Arsip Koran

Delpher.nl. "Hoogere Kweekschool Poerworedjo." *Het vaderland*, 31 Agustus 1914.

Delpher.nl. "Opening Hoogere Kweekschool." *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 20 Oktober 1916.

Buku

AM, Moehadi, Djuliaty Surojo, J Jamin, Titik Pratitis K, Djohar Noer Yohannes Ngga, and Teonika Dj. Bahon. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997.

Amirin, Tatang M. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2013.

Ex. HKS Bond. *50 Tahun Yang Lalu HKS Dihapuskan*, 1982.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia 1983,

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Suwignyo, Agus. *Pendidikan, Kekuasaan, Dan Kolonialisme*. Yogyakarta: Selarung Institute, 2019.

Notosusanto, Nugroho. *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Book Store, 1986.

Jurnal

- Kurniawati, Yeni, and Ayu Budi Santosa. "RAGAM PENDIDIKAN GURU MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA." *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 12, no. 2 (October 8, 2023): 257–76. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.64131>.
- Saputra, Romdhon Aji. "Perkembangan Sekolah Hollandsch Inlandsche School... (Romdhon Aji Saputra) 701." *Mozaik: Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* 3, no. 6 (2018): 701–15.

Skripsi

- Fitriyah, Fajar Rotin. "Telaah Konsep Pemikiran Tan Malaka Dalam Politik Pendidikan Berkarakter Ke-Indonesiaan Perspektif Pendidikan Islam." Surabaya, 2016.
- Kusumo, Caesar Bodro. "Kota Purworejo Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1900-1942." Universitas Negeri Semarang, 2015.

Internet

- Agung Pranoto. "Sejarah HKS (Hoogere Kweekschool) Purworejo," 2015.
- Ginaris, Lengkong Sanggar. "HKS Purworejo, Tetenger Pendidikan Guru Masa Kolonial Di Purworejo," 2015.